

**HUKUM SEWA MENYEWA KEBUN DENGAN MENGAMBIL
HASILNYA MENURUT MAZHAB SYAFI'I
(STUDI KASUS DI DESA MEKAR BARU KECAMATAN TALAWI
KABUPATEN BATU BARA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah

Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

UIN Sumatera Utara

Oleh

HERNINGSIH SYAWITRI

NIM: 24.13.4.056



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017 M/1438 H

IKHTISAR

Sesuai dengan hasil penelitian penulis tentang HUKUM SEWA MENYEWA KEBUN DENGAN MENGAMBIL HASILNYA MENURUT MAZHAB SYAFI'I DI DESA MEKAR BARU KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATU BARA telah ditemukan adanya masyarakat yang melaksanakan sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya. Penelitian ini dilakukan penulis dengan mengadakan wawancara kepada tokoh masyarakat dan melihat data statistik Desa Mekar Baru serta para warga yang mempunyai kebun kelapa dan yang menyewa. Hasil dari penelitian ditemukan ± 26 orang (78,3%) masyarakat yang menyewa kebun dengan mengambil hasilnya, sedangkan kebanyakan masyarakat menyatakan bahwa masyarakat tidak mengetahui secara jelas jika menyewa kebun dengan mengambil hasilnya itu tidak diperbolehkan. Berdasarkan penelitian masyarakat menyebutkan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi menyewa kebun dengan mengambil hasilnya yaitu alasan kewajaran dan alasan ekonomi, namun dari semua penyebab alasan terbanyak menyebutkan karena kewajaran dan tidak mengetahuinya yaitu 20 orang (75%). Praktek masyarakat Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tersebut ternyata tidak diperbolehkan oleh Mazhab Syafi'i yang menganalisa bahwa dalam konsep *ijarah* tidak diperbolehkan menyewa kebun dengan mengambil hasilnya (buahnya), masyarakat beralasan bahwa dengan akad *ijarah* benda yang disewakan tidak dapat berpindah kepemilikan kepada penyewa. Dengan demikian menurut Mazhab Syafi'i dalam *ijarah* yang boleh diambil adalah manfaat dari benda yang disewakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah, penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam selalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman yang penuh dekadensi moral dan kebodohan menuju umat yang penuh dengan pencerahan serta senantiasa menegakan risalah Nya. Skripsi ini disusun oleh penyusun sengaja untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam sebagai tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah berusaha seoptimal mungkin untuk menjadikan karya ilmiah ini sebaik-baiknya. Namun penyusun menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan ilmu yang dimiliki penyusun menjadikan skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik dari pembaca semua dengan segala kerendahan hati. terselesaikannya skripsi ini, penyusun banyak mendapat bantuan dan

dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah sepantasnya penyusun menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Dr. Zulham. M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan.
3. Fatimah Zahara, S.Ag. MA dan Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat.
4. Dra. Laila Rohani, M.Hum selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan semangat dan masukan berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Mamak dan Bapak tercinta Bapak Jarno Wedi dan Ibu Sumiati yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga.
7. Abang dan Kakak tercinta serta adikku yang lucu terima kasih atas doa dan dukungannya Hermawan Syahputra, S.Pd, Heyanto Dimas Putra dan Sri Rahayu Yusri.

8. Suami tercintaku Hatmiko, SP, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, support, doa, waktu, tenaga, pikiran, dan kasih sayang kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Makasi Sayang.
9. Bapak Suwono kepala desa yang telah memberikan ijin kepada penyusun untuk mengadakan penelitian di desa Mekar Baru dan semua pihak yang telah membantu penelitian ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staf Akademik Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara Medan, penyusun ucapkan terima kasih atas semua pengetahuan yang telah diberikan.
11. Teman-teman seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai sekarang Lili, Hafni, Rika, Febi, Yeni, Dewi, Azizah, Tengku, Rohani, Ilham, Nirma, Hayani, Tania, Dan Siti Hajjah.
12. Teman-teman KKN yang selalu memberikan semangat Hazwan, Humairah, Effendi, Lili, Ok, Nisa, Syafrida, Muhajir, Gundala, Leydi, dan yang lainnya.
13. Teman-taman kos yang selalu memberikan dukungan dan semangat Ismayuni, S.Pd, Tia, Putri, Fira, Halimah, Rahmi, Inur, Serli, Amel dan Mutia Mahrepa, S.Pd.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah membantu terselesaikanya skripsi ini.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang setimpal bagi semua pihak yang telah membantu penulis, dan semoga skripsi ini berguna bagi nusa dan bangsa, amin ya rabbal 'alamin.

Medan, November 2017

Penyusun

Herningsih Syawitri
NIM. 24.13.4.056

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Kajian Pustaka	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis	18
B. Letak Demografis	20

C. Agama dan Pendidikan.....	23
D. Adat Istiadat	28

BAB III PENGERTIAN UMUM TENTANG *IJARAH*

A. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	31
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	34
C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	37
D. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	41
E. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	42
F. Hikmah Disyariatkannya <i>Ijarah</i>	44

BAB IV HUKUM SEWA MENYEWA KEBUN DENGAN MENGAMBIL HASILNYA MENURUT MAZHAB SYAFI'I

A. Hukum Sewa Menyewa Kebun Dengan Mengambil Hasilnya Menurut Mazhab Syafi'i	46
B. Pelaksanaan Masyarakat Desa Mekar Baru Tentang Sewa Menyewa Kebun Dengan Mengambil Hasilnya	49
C. Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Sewa Menyewa Kebun Dengan Mengambil Hasilnya Menurut Mazhab Syafi'i	57
D. Analisa Penulis	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
1.	Status Tanah di Desa Mekar Baru	19
2.	Penggunaan Tanah di Desa Mekar Baru	19
3.	Keberadaan Desa Mekar Baru Berdasarkan Dusun Lingkungan	20
4.	Keadaan Masyarakat Penduduk Desa Mekar Baru Berdasarkan Jumlah Penduduk	21
5.	Jumlah Penduduk Desa Mekar Baru Berdasarkan Tingkatan Umur	22
6.	Jumlah Penduduk Desa Mekar Baru Berdasarkan Mata Pencaharian	23
7.	Jumlah Penduduk Desa Mekar Baru Berdasarkan Agama	25
8.	Keberadaan Rumah Ibadah Di Desa Mekar Baru Berdasarkan Penganut Agama	26
9.	Sarana pendidikan Desa Mekar Baru Berdasarkan Tingkatan	27
10.	Jumlah Masyarakat Desa Mekar Baru Berdasarkan Suku	30

DAFTAR WAWANCARA

A. Pihak Penyewa

1. Sudah berapa lama saudara/i menyewa kebun tersebut?
2. Apa yang melatarbelakangi saudara untuk lebih memilih menyewa kebun dari pada melakukan pekerjaan lain seperti mengolah sawah atau yang lainnya yang cenderung resikonya tidak terlalu besar?
3. Apakah anda pernah memikirkan resiko-resiko yang mungkin saja terjadi selama pekerjaan sewa ini berlangsung?
4. Selama anda menyewa resiko apa yang pernah anda alami? Dan bagaimana anda menyikapinya? Siapa yang bertanggung jawab terhadap resiko tersebut?
5. Bagaimana prosedur perjanjian dalam akad sewa menyewa tersebut?
6. Apakah kebun tersebut disewakan kepada masyarakat di luar desa?
7. Apakah ada perbedaan harga sewa apabila kebun tersebut disewakan kepada masyarakat di luar desa?
8. Selama menyewa kebun tersebut lebih banyak untung atau rugi?
9. Berapa harga sewa kebun tersebut?
10. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak?
11. Apabila kebun tersebut tidak berbuah bagaimana tindakan saudara?

B. Pemilik Kebun

1. Sudah berapa lama saudara menyewakan kebun?
2. Kenapa saudara memilih menyewakan kebun? Kenapa tidak dibiarkan berbuah kemudian buahnya yang dijual?
3. Apakah perjanjian sewa menyewa kebun ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Mekar Baru?
4. Bagaimana prosedur perjanjian yang saudara lakukan?
5. Apakah ada saksi dalam perjanjian tersebut?
6. Berapa harga menyewakan kebun tersebut?
7. Apakah selama saudara menyewakan kebun pernah terjadi resiko-resiko seperti kecelakaan kerja? siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi resiko seperti itu?
8. Apakah kebun tersebut lebih menguntungkan disewakan atau buahnya dijual langsung?
9. Siapa yang merawat kebun ketika sedang disewakan?
10. Apakah selama persewaan berlangsung pernah terjadi konflik/tidak? Apabila ada bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut?

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah swt yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad saw. Hukum Islam mencakup hukum ibadat dan hukum muamalat. Hukum ibadat mengatur manusia dengan Allah swt sedangkan hukum muamalat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta.

Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum islam tentang perkawinan, warisan, hibah, perdagangan, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Pada zaman yang serba modern ini manusia telah mengenal berbagai macam akad. Akad yang memfasilitasi berbagai kepentingan kita dalam kehidupan sehari-hari. Diantara jenis akad yang tidak terlepas dari kebutuhan manusia adalah akad sewa menyewa.

Sewa menyewa (*Ijarah*) adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, atau *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam

waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.¹

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-
iwadh* yang arti dalam bahasa indonesia ialah ganti dan upah.²

Dalam pengertian istilah *ijarah* menurut Syafi'i yaitu:

عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم³

Artinya: “Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehan nya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehan nya”.

Untuk *ijarah* yang sah, ada unsur-unsur penting yang terdiri dari penyewa dan yang menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, persetujuan persewaan. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus secara

¹ Mardani , *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), h. 247.

² Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 114.

³ Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz II, h. 332.

jelas memenuhi syarat dalam kontrak *ijarah* dan harus ada harga sewa yang pasti.⁴

Objek *ijarah* tidak boleh dijual si penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak belum berakhir dan boleh dijual apabila kontrak itu selesai. Objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan terimakan berikut segala manfaatnya. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.⁵

Dari definisi di atas yang jika dikaitkan dengan praktek sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya yaitu kebun kelapa yang disewa oleh masyarakat setempat seharusnya mempunyai perjanjian yang jelas kemudian penyewa mengambil manfaatnya untuk kepentingan pribadi mereka, manfaat tersebut dijual oleh penyewa ke pasar. Pada umumnya manfaat pada kebun ialah buahnya dan tidak dapat dijual karena si penyewa hanya menyewa kebunnya saja tetapi tidak untuk menjual manfaat kebun tersebut.

Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani ulama mazhab Syafi'i berpendapat dalam kitabnya, kitab "Nihayatussain":

⁴A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 471.

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 35.

المنفعة فلا يصح عقد اجارة الا (في) محص (منفعة) حالة, فلا يصح استئجار البستان للثمار
والشاة للبنها أو لصوفها أو وندها والبركة لسمكها, ولا يصح استئجار جحش صغير لأن وضع
الاجارة على تعجيل المنافع.⁶

Artinya: Akad sewa menyewa hanya sah dan boleh pada sesuatu yang siap manfaat (sesuatu yang punya manfaat tapi di masa yang akan datang tidak boleh, harus siap manfaat) begitu juga tidak sah menyewa kebun karena buahnya saja atau kambing karena susunya atau bulunya atau anaknya dan kolam karena ikannya begitu juga dengan anak keledai. Semua itu disebabkan bahwa penyewaan dilakukan dengan tujuan manfaat yang ada/siap kian.

Hal ini didasarkan pada firman Allah surat At-Talaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.⁷

Jika dilihat dari pendapat Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani di atas dihubungkan dengan sistem sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dimana telah dijelaskan bahwa untuk kelangsungan sewa menyewa kebun tidak dibolehkan mengambil hasilnya, karena dalam sewa menyewa kebun si penyewa tidak boleh menjual manfaatnya, apalagi tanpa persetujuan dari awal

⁶ Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, *Nihayatuzzain Fi Irsyadil Mubtadi'in*, (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2002), h. 253

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

oleh yang menyewakan. Maka menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani hukumnya tidak sah (batal).

Melihat pelaksanaan sewa menyewa ini dapat diketahui di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, bahwa yang dilakukan masyarakat Desa Mekar Baru tidak sesuai dengan pendapat Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, mereka mengambil manfaat pada objek sewa yang tidak termasuk dalam perjanjian untuk diperjual belikan hal ini dilakukan demi menambah keuntungan pribadi penyewa.

Dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Wahbah az-Zuhaili berpendapat:

والا يكون المنفعة الستيفاء عين قصدا, فلا تصح اجارة البستان لأخذ ثمرته, ولا الشاة لأخذ صوفها او لبنهز.⁸

Artinya: disyaratkan dalam manfaatnya tidak ada maksud mengambil barang dengan sengaja. Maka, tidak sah menyewakan kebun untuk diambil buahnya, atau kambing untuk diambil bulunya atau susunya.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Zein sebagai penyewa kebun kelapa di Desa Mekar Baru menjelaskan bahwa Bapak Zein menyewa kebun kelapa tersebut untuk usaha pemotongan kayu, selain itu Bapak Zein juga

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 409

bertujuan untuk mengambil buah nya kemudian buah kelapa tersebut dijual ke pasar. Keuntungan yang didapat dari penjualan buah kelapa tersebut hanya dia yang mengetahuinya, dan pemilik kebun kelapa tersebut tidak mengetahui kalau buah kelapanya dijual.⁹

Atas dasar permasalahan tersebut penulis hendak meneliti lebih jauh tentang sewa menyewa kebun dan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **HUKUM SEWA MENYEWAWA KEBUN DENGAN MENGAMBIL HASILNYA MENURUT MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DI DESA MEKAR BARU KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATU BARA)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dibahas dan dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hukum sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya menurut Mazhab Syafi'i.
2. Bagaimana pelaksanaan masyarakat Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tentang sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya.

⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Zein (Penyewa Kebun Kelapa) pada tanggal 16 April 2017

3. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap hukum sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya menurut Mazhab Syafi'i.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya menurut Mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan masyarakat Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tentang sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya.
3. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap hukum sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya menurut Mazhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Sedang manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir umat tentang hukum islam, khususnya dalam memahami dan mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i.
2. Sebagai informasi dan bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah.

3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya bagi orang yang menyewakan dan orang yang menyewa agar dapat dijadikan referensi dan acuan dalam mengetahui perjanjian terhadap sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya menurut Mazhab Syafi'i.

E. Kerangka Pemikiran

Sewa menyewa (*ijarah*) pada dasarnya adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad dengan tujuan saling meringankan, sewa menyewa (*ijarah*) termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama, sewa menyewa (*ijarah*) juga merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia.¹⁰

Sewa menyewa (*ijarah*) adalah suatu transaksi sewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.¹¹

Dalam pelaksanaan sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya tersebut juga nampak adanya unsur ketidaktepatan dari segi akad yang digunakan, di mana dalam sewa menyewa yang diakadkan adalah manfaat dari objek sewa, sedangkan dalam sewa menyewa kebun kelapa di Desa Mekar Baru

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 30.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 150.

yang diambil adalah buahnya, yang mana buah tersebut merupakan hasil pengikut dari pohon bukan manfaat pohon itu sendiri. Sejalan dengan persoalan sewa menyewa di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa akad sewa menyewa kebun di atas tidak sah, karena manfaat yang disewakan itu hendaklah jangan sampai mengandung lenyapnya sesuatu berupa zat, tetapi hanya harus semata-mata karena manfaat, mereka juga berpendapat bahwa barang (buah kelapa) tidak dapat dimiliki dengan akad sewa menyewa, hal tersebut sebagaimana penjelasan di bawah ini:

فلا يصح اكتراء بستان لثمره, لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا¹²

Artinya: Menyewakan kebun guna memanen buahnya yang tumbuh di dalamnya itu tidak sah, karena kebun buah tersebut tidak dapat dipindah kepemilikannya berdasarkan akad sewa.

Berbeda dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (ahli fikih mazhab Hambali), menurutnya bahwa pendapat jumhur ulama fikih tersebut di atas tidak didukung oleh Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Menurutya, yang menjadi prinsip

¹²Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'anaḥ at-Talibin*, Juz III (Surabaya: Usaha Keluarga, t.th), h. 110

dalam masyarakat Islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan dan susu pada kambing.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau kajian terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Setelah mengadakan penelaahan berbagai skripsi atau karya ilmiah di kalangan mahasiswa yang sudah pernah membahas masalah praktik sewa menyewa (*ijarah*), di bawah ini beberapa penelitian yang membahas tentang sewa menyewa, yaitu:

Pertama, oleh Halimah dalam skripsi berjudul, Persewaan Kamar Kos dengan Sistem Kontrak Menurut Hukum Islam (studi kasus persewaan kamar kos dengan sistem kontrak di Medan Tembung). Skripsi ini membahas tentang sewa menyewa kamar dengan sistem kontrak dalam tinjauan hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa sewa menyewa kamar kos yang terjadi di Medan Tembung belum sesuai dengan syari'at Islam karena rukun dan

syaratnya belum terpenuhi, yang mana obyek sewanya belum diketahui dengan jelas.

Kedua, oleh Siti Mukaromah Afifah dalam skripsi berjudul, *Perspektif Pemikiran Tokoh Agama dalam Praktek Sewa kolam Pancing dengan Sistem Kontrak (Studi Kasus di Desa Gelugur Sei Muka)*. Skripsi ini membahas tentang sewa menyewa kolam pancing dengan sistem kontrak dalam tinjauan hukum Islam dan pandangan para tokoh agama. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa sewa menyewa kolam pancing yang terjadi di Desa Gelugur Sei Muka adalah diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun dari sewa menyewa dalam melakukan suatu perjanjian yang berdasarkan kerelaan dan kesepakatan dari dua belah pihak.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya di atas, pada kesempatan kali ini peneliti membahas tentang Hukum Sewa Menyewa Kebun Dengan Mengambil Hasilnya Menurut Mazhab Syafi'i di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Penelitian penulis kali ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena masalah yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah tentang ketidak jelasan manfaat dari obyek yang disewa, yang mana adanya ketidak pastian dari produktivitas kebun yang disewa.

Pada skripsi ini yang diteliti oleh penulis adalah mengenai sewa kebun untuk diambil buahnya, yang mana yang dijadikan obyek sewa dari kebun tersebut adalah tanamannya, dalam penelitian ini obyek yang diteliti berbeda dengan obyek penelitian sebelumnya, yang membedakan lagi dari segi masalah yang diteliti, masalah yang diteliti penulis kali ini bukan hanya dari segi ketidakjelasan dari manfaat dari obyek yang disewa, akan tetapi pada ketidaksesuaian antara sigat akad (*ijab* dan *qabul*) dengan praktiknya, dan juga ketidaktepatan pada akad yang digunakan. Penelitian ini jelas tidak mengulangi penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu skripsi ini layak untuk diteliti.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi di lapangan.¹³ Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah pandangan dan praktek masyarakat tentang hukum sewa menyewa kebun

¹³ Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003), h. 231

dengan mengambil hasilnya dan menganalisisnya menurut pendapat Mazhab Syafi'i.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara berdasarkan Sampling yaitu penentuan tempat penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Adapun pertimbangan yang dimaksudkan penulis adalah masalah penelitian yang terjadi pada pemilik kebun dan yang menyewa kebun di Desa Mekar Baru.

Ada dua bentuk data dalam penelitian ini yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.¹⁴

¹⁴ Joko. P. Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung penulis pada pemilik kebun dan yang menyewa kebun di Desa Mekar Baru. Tentang bagaimana pandangan dan praktek sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya serta bagaimana pelaksanaannya.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau daya yang dapat memperkuat data pokok.¹⁵

Adapun data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sewa menyewa seperti literatur kitab-kitab Mazhab Syafi'i.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari

¹⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85

seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.¹⁶

Penelitian menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang di wawancarai adalah masyarakat, tokoh agama dan pejabat setempat.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁷

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dari penelitian jenis lainnya. Metode kualitatif menggunakan analisis data secara induktif dengan mengumpulkan data deskriptif (kata-kata, gambar) bukan angka-angka serta catatan lapangan pada penelitian.

¹⁶ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 162.

¹⁷ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman metode penelitian dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun skripsi ini peneliti membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang lokasi penelitian yang terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografis, agama dan pendidikan, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Bab ketiga merupakan pembahasan pengertian umum tentang *ijarah* yang terdiri dari pengertian sewa menyewa (*ijarah*), dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, berakhirnya akad *ijarah*, hikmah disyariatkannya *ijarah*.

Bab keempat membahas tentang sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya menurut Mazhab Syafi'i, pelaksanaan masyarakat Desa

Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tentang sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya, pemahaman masyarakat terhadap hukum sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya menurut Mazhab Syafi'i dan analisa penulis.

Bab kelima ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Desa Mekar Baru adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Desa Mekar Baru ini dikepalai oleh seorang kepala desa yang bernama bapak Suwono yang pusat pemerintahannya terletak di dusun IV. Dalam letak dari geografisnya desa Mekar Baru ini berdekatan dengan daerah-daerah lainnya yang termasuk kawasan Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.

Untuk lebih jelasnya letak geografis Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara dapat dilihat melalui perbatasan dengan wilayah lainnya yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Desa Petatal
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Desa Karang Baru
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan : PT. Buana Sawit Indah
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Desa Gelugur¹⁸

Berdasarkan data diatas dapat diketahui geografis Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tersebut yang keadaannya berbatasan

¹⁸ Data Statistik Kantor Desa Mekar Baru tahun 2016

dengan daerah lainnya, sehingga dari satu sisi keadaannya berdekatan dengan wilayah lainnya. Hal ini menjadikan Desa Mekar Baru merupakan salah satu tempat yang strategis jika dilihat dari tata tempat yang berwilayah di Kecamatan Talawi.

TABEL I
STATUS TANAH DI DESA MEKAR BARU

No.	Status Tanah	Jumlah	Luas	Keterangan
1.	Tanah kas desa	-	-	
2.	Tanah bersertifikat	68 buah	298 ha	
3.	Tanah belum bersertifikat	31 buah	192 ha	
	Jumlah	99 buah	490 ha	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Mekar Baru tahun 2016

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa keberadaan tanah di desa Mekar Baru ini lebih banyak memiliki sertifikat sehingga masyarakat mempunyai tanah yang legal (sah) sehingga dapat dibuat pemukiman penduduk, perkebunan, persawahan dan lain-lain.

TABEL II
PENGUNAAN TANAH DI DESA MEKAR BARU

No.	Penggunaan Tanah	Luas	Keterangan
1.	Tanah perumahan penduduk	40 ha	
2.	Tanah perkebunan	419 ha	
3.	Tanah persawahan	23 ha	
4.	Lain-lain	8 ha	
	Jumlah	490 ha	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Mekar Baru tahun 2016

Tabel di atas dapat menggambarkan bahwa penggunaan tanah di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi pada umumnya adalah areal tanah perkebunan dan ditambah dengan areal perumahan penduduk dan lain-lainnya. Berdasarkan luas Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi tersebut lebih kurang sekitar 75% sebagai areal perkebunan dan lebih kurang 25% sebagai areal perumahan, persawahan dan lain-lainnya.

B. Keadaan Demografis

Pada uraian terdahulu sudah dikemukakan bahwa luas daerah Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi \pm 490 ha dengan perbandingan persentasenya 75% untuk perkebunan dan 25% untuk areal perumahan, persawahan dan lainnya. Pada pembahasan selanjutnya penulis dapat mengemukakan keadaan demografis Desa Mekar Baru sebagaimana pada tabel di bawah ini:

TABEL III
KEBERADAAN DESA MEKAR BARU BERDASARKAN DUSUN /
LINGKUNGAN

No.	Dusun / Lingkungan	Jumlah	Keterangan
1.	Jumlah dusun / lingkungan	VII	
2.	Jumlah rukun warga (RW)	-	
3.	Jumlah rukun tetangga (RT)	-	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Mekar Baru tahun 2016

Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi mempunyai tujuh dusun, dimana antara dusun satu dengan yang lainnya saling berjauhan, hal ini disebabkan perumahan masyarakat termasuk dalam kategori tidak rapat sehingga di tengah-tengah pemukiman penduduk banyak dijumpai areal perkebunan yang dapat memisahkan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya dapat dikemukakan demografis dari jumlah masyarakat di Desa Mekar Baru kecamatan talawi sebagai berikut:

TABEL IV
KEADAAN MASYARAKAT PENDUDUK DESA MEKAR BARU
BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-laki	1217 orang	
2.	Perempuan	1105 orang	
	Jumlah	2322 orang	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Mekar Baru tahun 2016

Jumlah penduduk Desa Mekar Baru di atas menunjukkan bahwa lelaki lebih banyak jumlahnya dari pada perempuan dengan perincian laki-laki berjumlah 1217 orang dan perempuan berjumlah 1105 orang. Dari jumlah di atas ternyata masyarakat desa Mekar Baru Kecamatan Talawi terbilang cukup padat.

TABEL V

JUMLAH PENDUDUK DESA MEKAR BARU BERDASARKAN

TINGKATAN UMUR

No.	Tingkat Umur	Jenis kelamin		jumlah	ket
		Laki-laki	perempuan		
1.	0-6 tahun	260	100	360	
2.	7-12 tahun	198	76	274	
3.	13-18 tahun	183	77	260	
4.	19-24 tahun	289	132	421	
5.	25-55 tahun	189	265	454	
6.	56-79 tahun	126	273	396	
7.	80 keatas	53	104	157	
	Jumlah			2322	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Mekar Baru tahun 2016

Melihat tabel di atas ternyata masyarakat Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi yang mencapai usia 80 ke atas jumlahnya sedikit sekitar 157 orang sedangkan usia dewasa (usia 18-24) lebih banyak jumlahnya yaitu 454 orang dan usia-usia lainnya lebih beraneka ragam jumlahnya.

Untuk memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari, mata pencaharian masyarakat desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara lebih mayoritas di perkebunan sawit dan sawah ladang. Untuk mengetahui jumlah masyarakat berdasarkan mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL VI

**JUMLAH PENDUDUK DESA MEKAR BARU BERDASARKAN MATA
PENCAHARIAN**

No.	Mata Pencanharian	Jumlah	Keterangan
1.	Berkebun Sawit / Kelapa	429 orang	
2.	Bersawah	263 orang	
3.	Pengusaha	341 orang	
4.	Pedagang	93 orang	
	Jumlah	1126 orang	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Mekar Baru Tahun 2016

Dengan demikian terlihat secara jelas bahwa berkebun adalah mata pencaharian masyarakat Desa Mekar Baru sedangkan yang bekerja sebagai pedagang jumlahnya sangat sedikit, hal ini disebutkan pada dasarnya areal-areal yang tersedia di desa tersebut lebih banyak perkebunan.

C. Agama dan Pendidikan

Beragama merupakan suatu kecenderungan bagi umat manusia yang didorong sifatnya untuk meyakini dan mempercayai akan adanya suatu kekuatan yang menguasai alam dan melebihi kekuatan manusia. Kecenderungan beragama itu sudah lama tertanam dalam diri setiap manusia, sehingga di dalam Islam dikenal bahwa beragama merupakan hal yang fitrah yakni merupakan suatu kesucian yang diberikan Allah kepada umat manusia. Di

dalam Al-Quran surat al-Rum ayat 30 Allah menyatakan bahwa beragama merupakan fitrah yaitu sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.¹⁹

Agama pada prinsipnya mengatur dua hubungan yang saling berkaitan erat yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia sehingga agama islam memberikan sesuatu kemaslahatan atau kebaikan bagi setiap manusia itu sendiri, maka wajar jika salah seorang pemikir yang bernama Sidi Gazalba menyatakan bahwa agama islam adalah merupakan pandangan hidup bagi manusia.²⁰

¹⁹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

²⁰ Sidi Gazalba, *Ilmu dan Islam* (Jakarta: CV. Mulia, 1968), h. 95

TABEL VII

JUMLAH PENDUDUK DESA MEKAR BARU BERDASARKAN AGAMA

No.	Agama	Jumlah	Keterangan
1.	Islam	2316 Orang	
2.	Kristen Protestan	6 Orang	
3.	Kristen Katolik	-	
4.	Budha	-	
5.	Hindu	-	
	Jumlah	2322 Orang	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Mekar Baru tahun 2016

Gambaran data di atas menunjukkan bahwa di desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara yang beragama islam lebih mayoritas jumlahnya 2316 orang, sedangkan penganut agama kristen protestan jumlahnya sangat sedikit yaitu hanya 6 orang. Adapun bagi pengikut agama kristen katolik, agama budha dan agama hindu dinyatakan tidak ada penganutnya, hal ini disebabkan sedikitnya jumlah masyarakat yang ada di Desa Mekar Baru tersebut yakni 2322 orang.

Dengan adanya penganut agama di Desa Mekar Baru di atas, tentunya dalam menjalani aktivitas ibadah yang diperintahkan agamanya terdapat fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk pengamalan agama yang ada di desa tersebut.

TABEL VIII

**KEBERADAAN RUMAH IBADAH DI DESA MEKAR BARU
BERDASARKAN PENGANUT AGAMA**

No.	Prasarana Ibadah	Jumlah	Keterangan
1.	Masjid	3 buah	
2.	Mushalla	1 buah	
3.	Gereja	-	
4.	Vihara	-	
	Jumlah	4 buah	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Mekar Baru tahun 2016

Tabel di atas menjelaskan rumah ibadah yang terbanyak adalah bagi orang islam yaitu sebanyak empat buah terdiri dari tiga masjid dan satu mushalla, sedangkan rumah ibadah bagi umat kristiani yaitu gereja dinyatakan tidak ada, padahal penganut agama kristen tersebut ada dijumpai.

Pada dasarnya pendidikan merupakan hal yang sangat terpenting bagi maju atau tidaknya sebuah daerah ataupun negara yang ada. Sebuah negara dinyatakan ketertinggalan mutu dan kualitas pendidikan jika dibandingkan dunia internasional, sehingga implikasi dari hal itu negara indonesia termasuk kategori salah satu negara yang tertinggal dari pembangunan dan teknologi skala internasional. Peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan di indonesia harus segera ditindaklanjuti.

Gambaran di atas membuktikan bahwa begitu pentingnya permasalahan pendidikan bagi kehidupan manusia, sehingga dengan pendidikan harkat dan martabat dapat dijunjung tinggi. Secara konsep pendidikan merupakan prioritas utama apabila kehidupan seseorang ingin lebih maju dan bahagia, namun terkadang dalam realisasinya banyak dijumpai pemikiran masyarakat yang tidak menganggap masalah pendidikan adalah hal yang penting, artinya pendidikan adalah kebutuhan yang bersifat sekunder bukan primer.

TABEL IX
SARANA PENDIDIKAN DI DESA MEKAR BARU BERDASARKAN
TINGKATAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	Taman kanak-kanak (TK)	2 buah	
2.	Sekolah Dasar (SD) / Sederajat	2 buah	
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sederajat	1 buah	
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sederajat	1 buah	
5.	Pesantren	-	
6.	Perguruan Tinggi	-	
	Jumlah	6 buah	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Mekar Baru tahun 2016

Melihat data di atas ternyata sarana pendidikan yang ada di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara sangat terbatas, hal ini disebabkan keadaan Desa Mekar Baru yang hanya terdiri dari tujuh dusun / lingkungan dengan kapasitas penduduknya berjumlah 2322 orang, maka secara

logika hal tersebut merupakan suatu kewajaran sehingga banyak di antara masyarakat yang melanjutkan jenjang pendidikannya di luar daerah mereka.

D. Adat Istiadat

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berbudaya dan mempunyai adat istiadat yang dapat diandalkan dalam dunia internasional. Hal ini disebabkan Negara Republik Indonesia mempunyai beberapa macam suku yang tentunya memiliki adat istiadat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keberagaman adat istiadat di Indonesia membuktikan negara Indonesia mempunyai warisan-warisan yang perlu dilestarikan agar mempunyai perbedaan sekaligus ciri khas tertentu dengan negara lainnya.

Salah satu contoh dari adat kebiasaan masyarakat Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara adalah dalam acara “upah-upah” yang dilaksanakan ketika mengkhitankan anak laki-laki dan ketika acara aqiqah bayi yang baru lahir. Kedua orang tua dan keluarga membuat acara “upah” ini dalam rangka mensyukuri atas nikmat Allah swt yang telah diberikan kepada keluarga yang mempunyai acara tersebut.²¹ Acara upah-upah dilaksanakan dengan cara menyajikan nasi manis dengan disediakan ayam yang dipanggang

²¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Syarifuddin (tokoh masyarakat), Pada Tanggal 03 Oktober 2017

dan kemudian disulangkan kepada anak yang dikhitankan, ataupun disulangkan kepada kedua orang tua anak yang diakikahkan tersebut. Pelaksanaan upah-upah dilaksanakan oleh keluarga yang mempunyai hajat dengan harapan semoga keluarga dan anak-anak yang dikhitankan dan yang diakikahkan terhindar dari marabahaya dan malapetaka dari Allah swt.

Contoh lainnya yang termasuk praktek adat istiadat masyarakat di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi dilihat pada masyarakat suku Jawa, sebagaimana dalam acara kenduri, kirim doa untuk arwah keluarga yang sudah meninggal dunia, acara ini dilakukan pada malam-malam tertentu, seperti malam ketujuh, malam keempat puluh, malam keseratus hari dari meninggalnya keluarga yang terdekat. Kenduri kirim doa ini dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan dengan harapan dan doa semoga arwah yang sudah meninggal dunia diampinkan dosanya oleh Allah swt dan yang ditinggalkan agar dapat tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan tertentu.²² Dari semua uraian di atas, terdapat perbedaan pendapat antara adat istiadat yang dilaksanakan di Desa Mekar Baru sesuai dengan suku yang ada di tempat tersebut. Adat istiadat acara upah-upah dilakukan bagi masyarakat yang mempunyai suku Melayu, sedangkan acara

²² Hasil Wawancara Penulis dengan bapak H. Nasib (tokoh masyarakat), Pada Tanggal 03 oktober 2017

kenduri arwah dilaksanakan oleh masyarakat suku jawa khususnya dan masyarakat selain suku jawa.

TABEL X
JUMLAH MASYARAKAT DESA MEKAR BARU BERDASARKAN
SUKU

No.	Jenis Suku	Jumlah	Keterangan
1.	Batak	195 orang	
2.	Mandailing	32 orang	
3.	Jawa	1103 orang	
4.	Melayu	951 orang	
5.	Lain-lain	41 orang	
	Jumlah	2322 orang	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Mekar Baru tahun 2016

Data di atas menggambarkan bahwa suku yang terbanyak di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara adalah suku jawa dengan jumlah 1103 orang, sedangkan suku lainnya adalah sedikit seperti suku batak, suku mandailing, melayu dan lainnya. Secara mayoritas dapat dipahami bahwa suku jawa dan melayu merupakan terbanyak di Desa Mekar Baru.

BAB III

IJARAH DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Sewa menyewa (*Ijarah*)

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al'iwadh* yang artinya menurut bahasa Indonesia ialah ganti atau upah.²³ Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Sewa menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan kata الإِجَارَةُ, *al-ijarah* berasal dari kata, *al-ajru'* yang berarti , *iwad* (ganti), sedangkan *ijarah* menurut bahasa adalah upah, sewa, jasa atau imbalan. Menurut pengertian syara' sewa menyewa (*ijarah*) adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁴ Menurut Asy-Syarqawi menerangkan bahwa *ijarah* menurut bahasa adalah nama bagi upah (hadiah).

Ada beberapa definisi sewa menyewa (*ijarah*) menurut para ulama:

²³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada, 2005), cet ke-1. h. 114

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), cet. 5. h. 1

a. *Ijarah* menurut Mazhab Syafi'i:

مَعْلُومٌ بِعَوَضٍ وَإِيبَاحَةٍ لِلْبَدْلِ قَابِلَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ فَعَةٍ مِنْ عَلَى عَقْدٍ²⁵

"Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu".

b. *Ijarah* menurut Ulama Mazhab Hanafi:

بِعَوَضٍ مَنَافِعَ عَلَى عَقْدٍ

"Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan".

c. *Ijarah* menurut Ulama Mazhab Malikiyah dan Hanbaliyah:

مَعْلُومٌ بِعَوَضٍ مَعْلُومًا زَمَنًا رُ مَعْلُومَةٍ غِيٍّ فَهَ مِنْ تَمَلِّكٍ

"Pemilikan manfaat dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan yang diketahui".

Dari beberapa pendapat ulama di atas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang definisi *ijarah*, dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan dengan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan *ijarah* adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan penggunaan hasil/ manfaat suatu

²⁵ Muhammad al-Khathib al-Syarbani, *Mugniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr) Juz II, h. 332.

benda, binatang atau tenaga manusia.²⁶ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, sewa adalah memberikan pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa.²⁷ Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.²⁸

Penyewa memiliki manfaat yang ada pada seorang budak, rumah dan hewan tunggangan sampai pada masa yang diisyaratkan, sehingga si penyewa berhak untuk mengambil manfaat yang disewanya dari pada pemilik yang sebenarnya dan pemilik yang sebenarnya mendapatkan imbalan yang diambilnya dari hewan tunggangan dan rumah itu. Ini sejenis dengan jual beli.²⁹

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), cet XI. h. 24.

²⁷ W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 973.

²⁸ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2006), h. 381.

²⁹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terjemahan Abu Abdullah Muhammad bin Idris, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 3, h. 147

Berdasarkan beberapa definisi sewa menyewa (*ijarah*) di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa (*ijarah*) adalah suatu perjanjian timbal balik antara pihak pemilik dan penyewa dengan jalan pemberian imbalan sebagai ganti dari barang atau jasa yang disewa.

Pemilik barang yang dapat upah atas barangnya disebut dengan *mu'jir* dan nilai yang dikeluarkan sebagai imbalan dari manfaat-manfaat yang diperbolehkan disebut dengan *ijr* atau *ujrah* atau *ijar*, sewa yang mengandung arti upah. Maka apabila akad sewa-menyewa itu telah dipandang sah si penyewa berhak memiliki manfaat.³⁰

B. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar diperbolehkannya akad *ijarah* sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an, hadis, dan ijma' yang diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat al-Zukhruf (43) ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia,

³⁰ Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*. (Jakarta: Kalam Mulia. 1991), cet. 2. h. 5

dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.³¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan kelebihan sebagian hamba atas sebagian yang lain, ada yang kaya dan ada yang lemah, ada yang pandai dan ada yang bodoh, ada yang maju dan ada yang terbelakang, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad *ijarah* (sewa menyewa), karena dengan adanya akad *ijarah* (sewa menyewa) antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dapat saling membantu.³²

Disebutkan dalam firman Allah surat at-talaq (65) ayat 6:

....فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُوهُمْ....

Artinya:Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya....³³

2. Hadis

Dasar hukum *ijarah* dalam sabda Rasulullah adalah :

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

³² Widya Cahaya, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2011), h. 108-109.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda:
"Berikanlah/bayarlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering."
(Riwayat Ibnu Majah).³⁴

Hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban menyegerakan pembayaran upah para pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya, hadis tersebut mendorong agar manusia lebih menghargai karya dan keringat orang lain dan jangan menyepelekan.

3. Ijma'

Disamping al-Qur'an dan Sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah ijma'. Ulama pada masa sahabat telah sepakat akan kebolehan akad *ijarah*, karena manusia memerlukan akad semacam ini dalam kehidupan muamalah mereka. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terjadi suatu kewajiban untuk memperbolehkan akad *ijarah* atas manfaat ataupun jasa, karena pada

³⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram Terj. Moh. Ismail*, (Surabaya: Putra al-Ma'arif, 1992), h. 476.

hakikatnya akad *ijarah* juga merupakan akad jual beli, namun dengan objek yang berbeda yaitu manfaat atau jasa.³⁵

Dengan demikian jelas bahwa akad *ijarah* atau sewa menyewa hukumnya diperbolehkan, walaupun ada pendapat yang melarang sewa menyewa (*ijarah*), tetapi oleh pandangan jumhur ulama pandangan yang ganjil tersebut dipandang tidak ada.

C. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut Syafi'i rukun *ijarah* yaitu *ijab* dan *qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir* tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak yang berakad (transaksi).³⁶

Menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. 'Aqid (Dua orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad sewa menyewa ada dua yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan dan yang memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah dan yang menyewa sesuatu). Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan harus memiliki keahlian atau kemampuan, yaitu

³⁵ Muhammad Abd. Aziz Al-Kholidi, *Sunan Abi Dawud 2*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah), h. 464.

³⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terjemahan Abu Abdullah Muhammad bin Idris, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 3, h. 35

kedua-duanya berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

2. *Sigat* (Ijab dan Qabul)

Sigat ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian atau berupa perbuatan yang menjadi kebiasaan ijab qabul.³⁷

3. *Ujrah* (upah atau imbalan)

Yang dibuat akad yaitu ada dua macam yaitu: ada uang untuk membayar (upah) dan ada barang yang dimanfaatkan.

Adapun syarat-syarat upah, yaitu:

- a. Sudah jelas/ sudah diketahui.
- b. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya juga harus lengkap.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, h. 11.

4. Manfaat

Syarat sahnya manfaat yang mengharuskan adanya upah, yaitu:

- a. Hendaknya manfaat itu bisa ditaksir atau dihargai seperti menyewa hewan untuk dinaiki, atau menyewa rumah sebagai tempat tinggal.
- b. Hendaknya manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa.

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*).

Syarat sahnya akad *ijarah* menurut pendapat Sayyid Sabiq ada enam, yaitu:

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya apabila di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur keterpaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi surat an-Nisā' ayat 29:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Allah hendak menerangkan (hukum syari^{at}-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan

shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁸

2. Mengetahui manfaat obyek (barang) yang diakadkan dengan sempurna, maksudnya adalah dengan menjelaskan manfaatnya dimaksudkan mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari, dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
3. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut, apabila barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa tersebut batal.
4. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat begitupun dengan kegunaannya (manfaatnya). Misalnya menyewakan binatang sebagai alat pengangkutan yang lumpuh, hal ini tidak sah karena binatang tersebut tidak dapat mendatangkan manfaat.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

5. Manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan, perjanjian sewa menyewa barang yang manfaatnya tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama adalah tidak sah, misalnya perjanjian sewa menyewa rumah, yang mana rumah itu digunakan untuk menjual minuman keras dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang *ijarah*, baik benda ataupun orang untuk dipergunakan maksiat ataupun berbuat dosa.
6. Imbalan (*upah*) haruslah berbentuk harta yang mempunyai nilai yang jelas, baik dengan cara menginformasikan ciri-cirinya atau menyaksikannya secara langsung.³⁹

Sewa menyewa dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, apabila rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi maka akad *ijarah* menjadi batal atau tidak sah.

D. Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, menurut ulama fikih akad *ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Ijarah* yang bersifat manfaat.

Ijarah yang bersifat manfaat, dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda, di mana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, h. 13.

penyewa. Misalnya: sewa-menyewa rumah, kendaraan, dan lain sebagainya.

Ulama fikih sepakat memperbolehkan akad *ijarah*, apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan.

2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan.

Ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fikih, *ijarah* seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas, seperti: buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.⁴⁰

E. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Perjanjian sewa menyewa berlaku selama masa perjanjian yang telah ditentukan belum habis. Bila masa itu telah habis, perjanjian dipandang telah berakhir, tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya, dan barang sewa yang diminta harus dikembalikan kepemilikannya. Tanpa perjanjian baru, sewa-menyewa dipandang terhenti, kecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk seberapa lamanya dilangsungkan. Misalnya bila seseorang menyewa tanah pertanian selama setahun. Bila pada saat masa perjanjian itu habis, ternyata masih ada tanaman yang belum dapat dipanen, maka pemiliknya berhak untuk memberi kesempatan kepada penyewa menikmati hasil tanamannya itu, ia

⁴⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 133-134.

dapat memperpanjang waktu sewaan, dengan pembayaran sewa yang pantas untuk waktu perpanjangan yang diperlukan tersebut.

Adapun menurut Jumhur Ulama sifat akad *ijarah* adalah mengikat kecuali apabila ada cacat atau barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan dari pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijarah* tersebut menjadi batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan, akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta, oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.⁴¹

Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* menjadi batal karena adanya hal sebagai berikut:

1. Terjadinya aib (cacat) pada barang sewaan ketika berada ditangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti: ambruknya rumah.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti: baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak terpenuhi sesudah rusaknya (barang).

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 236.

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang ditentukan.

Penganut- penganut mazhab Hanafi berpendapat: salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijarah*, apabila ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti tercurinya barang-barang dagangan.⁴²

F. Hikmah Disyariatkannya *Ijarah*

Hikmah dalam pensyariatan sewa-menyewa sangatlah besar, karena di dalam sewa-menyewa terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pasti tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang. Adapun hikmah disyariatkannya *ijarah* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi perintah Allah.
2. Menimbulkan rasa tolong menolong.
3. Menaikkan pertumbuhan ekonomi dikalangan masyarakat.⁴³

Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, h. 29.

⁴³ An-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhajjab*, Juz XIII, h. 483

tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka.

Dan barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun. Maka aqad harus diutamakan dalam suatu sewa-menyewa, dan aqad itu harus jelas tanpa ada yang di sembunyikan dari pihak pemilik dan yang menerima sewa. Namun perlu diketahui manfaat dari sesuatu yang disewakan harus memiliki nilai-nilai yang tidak melanggar syari'at agama yang telah diatur dalam Islam. Inilah sebagian kecil hikmah disyariatkannya *ijarah* yang dapat dikemukakan penulis dalam mengungkapkan kemaslahatan dan keuntungan.

BAB IV
HUKUM SEWA MENYEWAWA KEBUN DENGAN MENGAMBIL
HASILNYA MENURUT MAZHAB SYAFI'I

Praktik sewa menyewa kebun yang terjadi di Desa Mekar Baru merupakan suatu perjanjian yang sudah lama dilakukan. Pada bab ini penulis akan menganalisis praktik sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.

A. Hukum Sewa Menyewa Kebun Dengan Mengambil Hasilnya Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam bab III penulis telah memaparkan tentang definisi sewa menyewa, dalam hal ini sewa menyewa (*ijarah*) adalah suatu transaksi sewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa kedua orang yang berakad (*Al-Muta'qidaini*) dalam pelaksanaan sewa-menyewa kebun dengan mengambil hasilnya telah memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, diantaranya yaitu kedua belah pihak telah baligh dan berakal sehat.

Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani ulama Mazhab Syafi'i berpendapat dalam kitabnya, kitab "Nihayatussain ":

المنفعة فلا يصح عقد اجارة الا (في) محص (منفعة) حالة, فلا يصح استئجار البستان للثما

ر والشاة للبنها أو لصوفها أو وندها والبركة لسمكها, ولا يصح استئجار جحش صغير لأن وضع

الاجارة على تعجيل المنافع.⁴⁴

Artinya: Akad sewa menyewa hanya sah dan boleh pada sesuatu yang siap manfaat (sesuatu yang punya manfaat tapi di masa yang akan datang tidak boleh, harus siap manfaat) begitu juga tidak sah menyewa kebun karena buahnya saja atau kambing karena susunya atau bulunya atau anaknya dan kolam karena ikannya begitu juga dengan anak keledai. Semua itu disebabkan bahwa penyewaan dilakukan dengan tujuan manfaat yang ada/siap kian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani bahwa dalam sewa menyewa hanya sah dan boleh pada sesuatu yang manfaatnya sudah jelas dan pasti. Kemudian dalam persewaan yang lain tidak diperbolehkan menyewa sesuatu yang manfaatnya sudah ada seperti menyewa kebun karena buahnya, menyewa kolam karena ikannya dan menyewa kambing karena susunya sebab semua itu bukan manfaat yang dapat dimiliki dengan akad sewa menyewa.

Dari hal tersebut sebagian besar masyarakat di Desa Mekar Baru telah melakukan sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya karena bagi mereka menyewa kebun merupakan hal yang sangat mudah untuk mendapatkan

⁴⁴ Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, *Nihayatuzzain Fi Irsyadil Mubtadi'in*, (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2002), h. 253

penghasilan tambahan. Maka dari itulah terjadi kerja sama sewa menyewa kebun, tetapi kerja sama tersebut tidak didasarkan atas perjanjian yang jelas semata-mata hanya saling percaya tanpa adanya bukti dari perjanjian tersebut yaitu perjanjian tertulis.

Muhammad Syata ad-Dimyati juga menjelaskan tentang sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya yaitu sebagai berikut:

فلا يصح اكتراء بستان لثمره, لأن الأعيان لا تملك بعقد الاجارة قصدا⁴⁵

Artinya: Menyewakan kebun guna memanen buahnya yang tumbuh di dalamnya itu tidak sah, karena kebun buah tersebut tidak dapat dipindah kepemilikannya berdasarkan akad sewa.

Pendapat Muhammad Syata ad-Dimyati sejalan dengan pendapat Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani bahwa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya dinyatakan tidak boleh termasuk kategori menyewa kebun dengan mengambil hasilnya karena kebun buah tersebut tidak pindah kepemilikannya berdasarkan akad sewa.

⁴⁵Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'alah at-Talibin*, Juz III (Surabaya: Usaha Keluarga, t.th), h. 110

Dalam pelaksanaan sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya yaitu kebun kelapa yang disewa oleh masyarakat setempat seharusnya mempunyai perjanjian yang jelas kemudian penyewa mengambil manfaatnya untuk kepentingan pribadi mereka, manfaat tersebut dijual oleh penyewa ke pasar. Pada umumnya manfaat pada kebun ialah buahnya dan tidak dapat dijual karena si penyewa hanya menyewa kebunnya saja tetapi tidak untuk menjual manfaat kebun tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwasanya kebun yang disewakan bisa berjalan sampai jangka waktu kerjasama berakhir, meskipun di tengah jangka waktu kerjasama sewa menyewa pihak yang menyewakan meninggal dunia. Akan tetapi tidak semua kerjasama sewa menyewa kebun di Desa Mekar Baru berjalan dengan lancar. Itu disebabkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat di Desa Mekar Baru tentang kerjasama sewa menyewa kebun.

B. Pelaksanaan Masyarakat Desa Mekar Baru Talawi Kabupaten Batu Bara Tentang Sewa Menyewa Kebun Dengan Mengambil Hasilnya

Dalam pelaksanaan sewa menyewa di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, masyarakat menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi guna terlaksananya sewa menyewa agar tidak terjadinya tuntutan atau

persengketaan dibelakang hari. Penentuan persyaratan diharapkan agar sewa menyewa yang ada dapat memberikan asas pertolongan sesama pihak, yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

Sesuai dengan penelitian penulis dijelaskan dalam sewa menyewa yang dilaksanakan di Desa Mekar Baru ditentukan beberapa persyaratan yaitu sebagai berikut:

1. Pihak penyewa dan yang menyewakan
2. Adanya transaksi sewa menyewa
3. Adanya benda yang disewakan
4. Penentuan waktu sewa
5. Penentuan harga dari benda yang disewakan
6. Pembayaran uang sewa⁴⁶

Berdasarkan persyaratan yang disebutkan diatas jika dilihat menurut hukum Islam sama halnya dengan rukun sewa menyewa, tetapi masyarakat Desa Mekar Baru berbeda menyebutkannya dan masyarakat dalam menentukan persyaratan di atas tidak berdasarkan hukum Islam melainkan hanya pemahaman yang mereka tahu.

⁴⁶Hasil Wawancara penulis dengan Ibu Dwi (Guru MDA) pada tanggal 10 Oktober 2017.

Pertama, dalam sewa menyewa maka harus terdapat kedua belah pihak yang membutuhkannya yaitu pihak penyewa dan yang menyewakan. Pihak penyewa tidak ditentukan harus orang kaya, sehingga jika penyewa dari kalangan masyarakat ekonomi rendah dapat menyewa benda yang disewakan sedangkan pihak yang menyewakan harus merupakan orang yang benar-benar mempunyai benda yang disewakan.

Penentuan di atas tidak selamanya harus orang Islam, sehingga seandainya salah satu pihak tidak beragama Islam, seperti Kristen maka sewa menyewa tetap berlangsung dengan semestinya. Dalam praktek masyarakat Desa Mekar Baru tersebut di atas juga dijumpai salah satu pihak khususnya penyewa bukan berasal dari daerah Desa Mekar Baru bahkan dari luar daerah tersebut. Dengan demikian maka pihak penyewa yang ada di Desa Mekar Baru tidak selamanya berasal dari daerahnya, sangat memungkinkan dari luar desa mereka.

Kedua, persyaratan selanjutnya harus ada transaksi sewa menyewa. Penentuan transaksi sewa menyewa harus dikemukakan oleh kedua belah pihak

agar tidak terjadi perselisihan dibelakang hari.⁴⁷ Adapun praktek masyarakat dalam pernyataan akadnya:

Pemilik Kebun : aku sewakan kebun ini sebesar tiga hektar dengan harga Rp. 5.000.000,- selama lima bulan.

Penyewa : aku sewa kebun ini sebesar tiga hektar dengan harga Rp. 5.000.000,- yang kita sepakati.

Penentuan di atas sangat dibutuhkan agar membedakan dengan akad jual beli, karena dengan transaksi sewa menyewa maka tidak pindah hak milik selamanya. Dengan transaksi sewa menyewa ini pihak penyewa hanya dibenarkan memanfaatkan benda yang disewakan, sedangkan bendanya tetap milik pihak yang menyewakan.

Masyarakat Desa Mekar Baru sangat sering melakukan praktek sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya, menurut masyarakat setempat yakni Bapak Timin bahwa setiap melakukan transaksi sewa menyewa harus disertai dengan ijab qabul dan perjanjian yang mengikat, kemudian pada saat persewaan berlangsung yang mengelola kebun tersebut biasanya yang menyewa karena pemilik sudah menyerahkan sepenuhnya kepada penyewa. Tetapi, jika ada

⁴⁷ Hasil Wawancara penulis dengan Ibu Fitria Ningsih (tokoh masyarakat dikalangan ibu-ibu) pada tanggal 10 Oktober 2017.

kerusakan terhadap barang yang disewa maka seharusnya yang menanggung pemilik kebun tersebut.⁴⁸

Ketiga, adanya benda yang disewakan. Di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi benda yang disewakan lebih banyak tanah perkebunan, ada juga yang lainnya seperti rumah, kendaraan dan binatang ternak. Maka ketika melakukan transaksi sewa menyewa benda yang disewakan harus jelas.

Masyarakat yang melakukan praktek sewa menyewa harus sudah mengetahui sebelumnya benda yang akan disewa dan disewakan. Menurut Bapak Jamingan selaku penyewa kebun pernah kedatangan menyewa kebun yang tidak berbuah, dalam hal ini Bapak Jamingan merasa rugi dan mengakhiri perjanjian sewa menyewa tersebut karena sudah lebih dari 4 (empat) bulan menyewa tetapi tidak ada hasilnya.⁴⁹ Ini yang menjadi perdebatan di masyarakat Desa Mekar Baru karena masyarakat Desa Mekar Baru tidak memahami dan mengetahui sistem dan prosedur sewa menyewa.

Keempat, penentuan waktu sewa. Penentuan waktu sangat penting diucapkan ketika transaksi agar tidak dianggap pihak penyewa seperti dalam jual

⁴⁸ Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Timin (masyarakat) pada tanggal 11 Oktober 2017.

⁴⁹ Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Jamingan (penyewa kebun) pada tanggal 11 Oktober 2017.

beli. Dalam penentuan waktu, pihak yang menyewakan dan penyewa sepakat seperti 5 tahun, sehingga dalam jangka lima tahun penyewa dapat mengatur waktunya.

Kelima, penentuan harga benda yang disewakan. Dalam sewa menyewa di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi penetapan harga ketika transaksi sewa menyewa harus dijelaskan dengan jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam sewa menyewa. Sebagai pemilik kebun berhak menentukan harga sewa kebunnya, baik ditawarkan dengan harga tinggi atau harga yang normal. Dengan kata lain, harga sewa kebun yang menentukan pemiliknya. Dalam hal penentuan harga ini pihak yang menyewakan memberikan harga yang sifatnya dapat ditawar sesuai dengan keinginan dan kesanggupan penyewa, sehingga pihak yang menyewakan juga harus setuju dengan ketetapan harga yang disanggupi oleh pihak penyewa.

Keenam, pembayaran uang sewa. Persyaratan dalam pembayaran uang sewa menyewa, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas sesuai dengan kesepakatan antara pihak penyewa dengan yang menyewakan.

Setiap manusia pasti pernah melakukan transaksi muamalah salah satunya yaitu sewa menyewa. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa dalam sewa menyewa harus ada pembayaran uang sewa. Pembayaran uang sewa bisa

dibayar pada saat transaksi sedang berlangsung maupun diakhir setelah masa sewa akan berakhir. Semua tergantung pada kesepakatan antara penyewa dan yang menyewakan. Dalam sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara bahwa dalam sistem pembayaran uang sewa yang dilakukan para penyewa dan pemilik biasanya harus dibayar di awal pada saat menyewa. Tetapi semua itu kembali pada kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Kebanyakan yang dijumpai yaitu membayar uang sewa setelah selesai dan habis masa sewanya. Ada juga yang melakukan pembayaran uang sewa di awal. Hal ini sesuai dengan apa yang disepakati antara kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi sewa menyewa.⁵⁰

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab III bahwa dalam praktik sewa menyewa terkadang penyewa tidak memenuhi perjanjian yang dibuatnya dengan pemilik kebun, yang mana pada saat akad (perjanjian) sewa menyewa berlangsung pemilik dan penyewa sepakat bahwa yang disewa dari kebun tersebut adalah lahannya, akan tetapi pada saat pelaksanaan sewa menyewa tersebut terkadang penyewa tidak hanya mengambil hasil dari kebun tersebut tetapi juga mengambil

⁵⁰ Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Edi (pejabat setempat) pada tanggal 11 Oktober 2017.

kayu dari kebun yang disewa.⁵¹ Perilaku yang dilakukan penyewa tersebut sudah merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan bagi masyarakat Desa Mekar Baru yang melakukan praktik sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya, dari kenyataan yang ada di lapangan tersebut jelas bahwa kebiasaan atau tradisi sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena penyewa tidak menepati janji yang dibuatnya dengan pemilik kebun.

Selama sewa menyewa berlangsung masyarakat Desa Mekar Baru sering mengalami kejadian dan hal-hal yang tidak terduga dalam persewaannya, dan kejadian yang dialami penyewa tidak ditanggung oleh yang menyewakan, sebab masyarakat beranggapan setiap menyewa apapun bentuknya baik perkebunan maupun rumah maka kerusakan ditanggung penyewa.⁵² Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam kerusakan yang terjadi ketika penyewa yang menggunakan maka yang menanggung segala bentuk kerusakan tersebut adalah pemilik atau yang menyewakan.

Menurut Bapak Gimin selaku pemilik kebun jika kebun tersebut disewakan maka keuntungan yang didapat lebih besar dari menjual hasil kebunnya sendiri,

⁵¹ Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Edi (pejabat setempat) pada tanggal 11 Oktober 2017.

⁵² Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Ustadin (pejabat setempat) pada tanggal 12 Oktober 2017.

sebab Bapak Gimin tidak perlu merawat dan mengelola kebun dengan susah payah. Kemudian jika hasil dari kebun tersebut dijual sendiri maka hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ditambah dengan biaya untuk proses perawatan kebun agar mendapatkan hasil yang baik dan berkualitas, maka menurut Bapak Gimin hal tersebut memerlukan biaya yang sangat besar.⁵³

Dalam pelaksanaan sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya mereka hanya berpedoman kepada kebiasaan masyarakat yang sering melakukan perjanjian tersebut. Mereka hanya berpikir bahwa dengan melakukan sewa menyewa tersebut akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Padahal pada dasarnya sewa menyewa yang seperti mereka lakukan tersebut tidak diperbolehkan Mazhab syafi'i karena sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya tersebut tidak dapat pindah kepemilikannya berdasarkan akad sewa. Tetapi, masyarakat Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi tidak mengetahui hal tersebut.

C. Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Sewa Menyewa Kebun

Dengan Mengambil Hasilnya Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan sesuatu disebut *mu'jir*, pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, berdasarkan penelitian yang

⁵³ Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Gimin (pemilik kebun) pada tanggal 12 Oktober 2017.

dilakukan oleh penulis, bahwa yang menjadi subyek (pelaku) adalah pemilik kebun dan penyewa, dalam fiqh muamalah syarat kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* adalah:

1. Keduanya baligh dan berakal sehat, dalam artian jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil, maka akad tersebut menjadi tidak sah.
2. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya apabila di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur keterpaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.⁵⁴ Ketentuan ini sejalan dengan bunyi surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁵

⁵⁴ Chairuman Pasaribu et al, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 54.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan bahwa kedua pihak yang berakad dalam praktik sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya adalah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam, karena kedua belah pihak tersebut telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan hukum Islam tentang sewa menyewa.

Dalam hal obyek sewa pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam praktik sewa menyewa kebun dengan mengambil hasilnya di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara yang menjadi obyek sewa adalah kebun. Kebun tersebut disewakan untuk diambil buahnya sebagai penghasilan mereka, dalam hukum Islam obyek sewa menyewa (*ijarah*) mempunyai beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut. Apabila barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa tersebut batal.
2. obyek sewa menyewa dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat begitupun dengan kegunaannya (manfaatnya).

3. Manfaat dari benda yang disewakan adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.⁵⁶

Kenyataan yang ada di lapangan, apabila obyek sewa kebun untuk diambil hasilnya tersebut dianalisis menurut Mazhab Syafi'i, maka praktik sewa menyewa yang ada di Desa Mekar Baru tersebut belum memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa, karena dalam praktik sewa kebun untuk diambil hasilnya tersebut obyek yang disewa belum jelas, yaitu apakah selama masa sewa berlangsung kebun tersebut dapat menghasilkan buah atau tidak, dalam praktiknya para pihak yang melakukan akad sewa kebun untuk diambil hasilnya tersebut hanya mengira-ngira saja kapan kebun tersebut dapat menghasilkan buah yang lebat atau tidak, perkiraan para pihak tersebut di tentukan dari keadaan musim yang berlangsung, dengan demikian obyek sewa yang ada dalam praktik sewa kebun di Desa Mekar Baru tersebut belum memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa karena obyeknya belum jelas.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Poniman selaku pemilik kebun bahwa setiap masyarakat yang melakukan praktek sewa menyewa kebun hanya berpedoman terhadap pemahaman yang mereka ketahui, menurut Bapak Poniman

⁵⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, 13.

masyarakat Desa Mekar Baru dalam melakukan perjanjian sewa menyewa hanya berlandaskan pada kepercayaan diantara kedua belah pihak yaitu antara penyewa dan yang menyewakan. Selama perjanjian sewa menyewa dilaksanakan tidak ada saksi yang mengetahuinya, tidak ada orang lain yang mengetahui perjanjian tersebut selain penyewa dan pemilik kebun. Selanjutnya dalam hal ini pemilik kebun sepenuhnya menyerahkan kepercayaan kepada penyewa untuk dipergunakan.⁵⁷

Telah dijelaskan bahwa dalam melakukan perjanjian haruslah ada saksi yang mengetahui agar pada saat terjadi resiko atau kecelakaan kerja pada penyewa pemilik kebun dapat mengetahui secara jelas terjadi karena kelalaian penyewa atau pemilik kebun. Dalam surat Al-baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.⁵⁸

Dalam hal apapun sebaiknya menghadirkan saksi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Maka setiap bermuamalah melakukan perjanjian sebaiknya

⁵⁷ Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Poniman (pemilik kebun) pada tanggal 13 Oktober 2017.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

menghadirkan saksi agar tidak terjadi perselisihan dibelakang hari begitu juga dalam perjanjian sewa menyewa.

Dari berbagai penjelasan di atas tersebut masyarakat Desa Mekar Baru memahami bahwa mereka yang melakukan perjanjian sewa menyewa hanya berpedoman pada apa yang mereka ketahui. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Mazhab Syafi'i.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Musirin selaku penyewa kebun bahwa Bapak Musirin menyewa kebun tersebut karena tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka Bapak Musirin menyewa kebun karena faktor ekonomi. Kemudian sistem pembayarannya sebagaimana telah disepakati oleh pemilik kebun bisa diangsur atau dibayar setelah waktu sewa habis karena menunggu penghasilan panen dari kebun tersebut.⁵⁹ Bapak Musirin sering melaksanakan sewa menyewa kebun ini karena terkadang Bapak Musirin mendapatkan keuntungan yang lebih dan tidak selamanya juga Bapak Musirin mendapatkan keuntungan pernah juga mengalami kerugian dan kerugian itu ditanggung oleh Bapak Musirin sendiri.

⁵⁹ Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Musirin (Penyewa Kebun) pada tanggal 12 Oktober 2017.

D. Analisa Penulis

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengemukakan beberapa analisa antara lain adalah:

Pertama, penulis menganggap praktek masyarakat Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tidak sesuai dengan konsep sewa menyewa dalam hukum Islam, hal ini disebabkan yang boleh diambil dari benda yang disewakan adalah manfaat dari benda tersebut, bukan benda yang disewakan, maksudnya adalah ketika seseorang menyewa kebun maka yang boleh diambil adalah manfaat dari kebun tersebut, sedangkan jika yang diambil adalah hasilnya maka sudah termasuk bendanya juga.

Kedua, penulis menganggap bahwa masyarakat Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara yang melaksanakan menyewa kebun dengan mengambil hasilnya adalah berdasarkan kebiasaan maka hal tersebut tidak dapat diterima menjadi produk hukum yang sah, hal ini disebabkan hukum Islam tidak menerima sebuah kebiasaan di masyarakat sebagai alasan pembenaran hukum Islam jika berbeda dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Ketiga, penulis menganggap praktek masyarakat Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara membawa kerugian bagi pihak yang menyewakan kebun, karena jika dilihat hasil yang diperoleh dari kebun adalah milik dari pihak yang menyewakan kebun, sehingga dalam akad ijarah tidak termasuk milik penyewa, penyewa hanya dibenarkan memperoleh keuntungan dari kebunnya saja. Sedangkan selain dari itu tidak dibenarkan seperti mengambil hasilnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktek masyarakat Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara yang menyewa kebun dengan mengambil hasilnya tidak sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i, sehingga penulis berkesimpulan agar masyarakat segera menghentikan praktek tersebut.
2. Masyarakat yang mempraktekkan menyewa kebun dengan mengambil hasilnya ternyata jumlahnya banyak yaitu 26 orang (78,3%), sedangkan alasan masyarakat terbanyak menyebutkan karena kewajiban dan tidak mengetahuinya yaitu 20 orang (75%). Keberadaan data di atas membuktikan antara praktek dan pendapat Mazhab syafi'i sama sekali tidak sesuai, sehingga penulis beranalisa bahwa kebiasaan masyarakat di atas tidak dibenarkan (salah).
3. Masyarakat Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara dalam memahami konsep *ijarah* bahwa mereka yang melakukan perjanjian sewa menyewa hanya berpedoman pada apa yang mereka ketahui.

B. Saran

Dalam hal ini penyusun ingin memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan bagi masyarakat Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara agar segera menghentikan kebiasaan menyewa kebun dengan mengambil hasilnya.
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara agar lebih memahami konsep *ijarah* secara jelas agar sesuai dengan hukum Islam.
3. Diharapkan kepada insan akademisi untuk terus memberikan pemahaman dan pengkajian bagi masyarakat termasuk Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara terhadap konsep *ijarah* sesuai dengan hukum Islam.
4. Diharapkan kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama terus bekerjasama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar kebiasaan yang selama ini yang tidak sesuai dengan hukum Islam kiranya dapat menghentikannya dan penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugul Maram Terj. Moh. Ismail*, Surabaya: Putra al-Ma'arif, 1992.
- Al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. *Nihayatuzzain Fi Irsyadil Mubtadi'in*, Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2002.
- Al-Kholidi, Muhammad Abd. Aziz *Sunan Abi Dawud 2*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Syarbayniy, Muhammad al-Khathib. *Mughniy al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz II.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: al-Ma'arif, 1997, cet XI.
- Cahaya, Widya. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Gazalba, Sidi. *Ilmu dan Islam*, Jakarta: CV. Mulia, 1968
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terjemahan Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, cet. 3.
- Karim, Helmi. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Koentjoningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1997.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2012.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 13*, Jakarta: Kalam Mulia. 1991, cet. 2.

Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 2006.

Subagyo, Joko. P. *Metologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sugianto, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo, 2003.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Petatal pada tanggal 28 Desember 1995. Putri dari pasangan Jarno Wedi dengan Sumiati, dan penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Jenjang pendidikan penulis, Sekolah Dasar Negeri 015888 Karang Baru tamat tahun 2007 dan setelah itu melanjutkan Madrasah Tsanawiyah Negeri Lima Puluh tamat tahun 2010. Setelah itu melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah Negeri Lima Puluh tamat tahun 2013. Kemudian melanjutkan keperguruan tinggi ke UIN SU Medan tahun 2013 dan mengambil jurusan Muamalah di Fakultas Syariah dan Hukum.